

List of Tax & Customs Regulation July Period I-2026			
No.	Nomor Peraturan	Tanggal	Tentang
1	Siaran Pers SP- 80/KLI/2026	2-Jul-26	Pemerintah ajukan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk perkuat daya saing nasional
2	PENG-40/PJ.09/2026	26-Jun-26	Pengiriman email resmi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dengan indikasi Kesalahan pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
3	PENG-39/PJ.09/2026	26-Jun-26	Pengiriman email resmi pengingat tunggakan pajak
4	PMK Nomor 44 Tahun 2026	22-Jun-26	Persyaratan utk menjadi kuasa dibidang perpajakan dan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuham kewajiban kuasa di bidang perpajakan
5	PMK Nomor 43 Tahun 2026	20-Jun-26	PPN atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi pada periode libur sekolah yg ditanggung Pemerintah tahun anggaran 2026
6	PENG-37/PJ.09/2026	5-Jun-26	Penyelesaian permintaan kembali PPN dan PPnBM kepada Orang Pribadi pemegang paspor luar negeri sehubungan dgn waktu henti (down time) sistem coretax DJP
7	PMK Nomor 40 Tahun 2026	3-Jun-26	Pengenaan Bea Masuk Antidumping atas Impor Produk Karton Dupleks dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan
8	Permendag Nomor 17 Tahun 2026	29-May-26	Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Paduan Besi
9	Permendag Nomor 16 Tahun 2026	29-May-26	Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Kelapa Sawit
10	Permendag Nomor 15 Tahun 2026	29-May-26	Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Batubara
11	PP Nomor 24 Tahun 2026	20-May-26	Tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis
12	PMK Nomor 37 Tahun 2026	20-May-26	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial
13	PMK Nomor 36 Tahun 2026	20-May-26	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur (Bed Valance), dan Barang Perabot Lainnya
14	PP Nomor 21 Tahun 2026	6-May-26	Perubahan ketiga PP Nomor 36 Tahun 2023 ttg devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan dan/atau pengolahan sumber daya alam
15	PER-6/PJ/2026	4-May-26	Tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional
16	KEP – 00002/PDH-CT/PJ/2026	4-May-26	Tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi Wajib Pajak, Orang Pribadi, dan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Ddirektorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus
17	KEP-71/PJ/2026	30-Apr-26	Kebijakan perpajakan sehubungan dgn implementasi sistem inti administrasi perpajakan dalam rangka penyampaian SPT PPh Badan tahun pajak 2025
18	PENG-31/PJ.09/2026	30-Apr-26	Kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2025
19	PMK Nomor 28 Tahun 2026	29-Apr-26	Tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
20	PP Nomor 20 Tahun 2026	22-Apr-26	Perubahan PP Nomor 55 Tahun 2026 ttg penyesuaian pengaturan di bidang PPh
21	PMK Nomor 26 Tahun 2026	22-Apr-26	Tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyeteroran pajak rokok
22	PMK Nomor 24 Tahun 2026	21-Apr-26	PPN atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dalam Rangka Dukungan Pemerintah Terhadap Kenaikan Harga Avtur yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026
23	PER-5/PJ/2026	20-Apr-26	Pengakuan penghasilan dan biaya serta penghitungan penghasilan kena pajak tahun pajak 2025 bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan mengenai kontrak asuransi
24	PENG - 29/PJ.09/2026	7-Apr-26	Penggunaan coretax mobile/m-pajak untuk pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi karyawan status nihil
25	Keputusan Gubernur DKI Nomor 339 Tahun 2026	30-Mar-26	Kebijakan PBB perdesaan dan perkotaan tahun 2026

26	KEP-55/PJ/2026	27-Mar-26	Kebijakan perpajakan sehubungan dengan implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam rangka penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2025
27	PENG-28/PJ.09/2026	27-Mar-26	Kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT PPh Orang Pribadi untuk tahun pajak 2025
28	PENG-27/PJ.09/2026	26-Mar-26	Kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT PPh orang pribadi utk tahun pajak 2025
29	PMK Nomor 18 Tahun 2026	17-Mar-26	Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
30	PER-3/PJ/2026	16-Mar-26	Tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan
31	PENG-25/PJ.09/2026	10-Mar-26	Imbauan penerbitan bukti potong pajak penghasilan dalam rangka pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi melalui coretax DJP
32	Permendagri Nomor 11 Tahun 2026	6-Mar-26	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat
33	PENG-20-PJ.09-2026	23-Feb-26	Penggunaan coretax form untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi status nihil
34	ND-03/PJ/PJ.09/2026	20-Feb-26	Kebijakan pelayanan selama bulan ramadan dan pada batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP tahun pajak 2025
35	PMK Nomor 8 Tahun 2026	11-Feb-26	Perubahan atas PMK Nomor 228/PMK.03/2017 ttg rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yg berkaitan dgn perpajakan
36	PMK Nomor 6 Tahun 2026	9-Feb-26	Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima dan/atau Diperoleh Peserta Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026
37	PMK Nomor 5 Tahun 2026	9-Feb-26	PPN DTP dalam rangka pemberian sumbangan bencana Sumatera tahun anggaran 2026
38	PMK Nomor 4 Tahun 2026	6-Feb-26	PPN atas penyerahan jasa angkutan udara berjadwal dalam negeri kelas ekonomi pada periode libur idul fitri yang ditanggung Pemerintah tahun anggaran 2026
39	PMK Nomor 1 Tahun 2026	22-Jan-26	Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan
40	PENG-1/PJ/2026	20-Jan-26	Daftar yurisdiksi partisipan dan yurisdiksi tujuan pelaporan dalam rangka pertukaran informasi rekening keuangan secara otomatis (automatic exchange of financial account information/AEOI-CRS) tahun 2026